

TINJAUAN EKONOMI POLITIK KRITIS TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA PEREMPUAN STUDI KASUS MAHASISWI DI KOTA MAKASSAR

Hastuti¹, Sakinah Nadir²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Email Korespondensi: Hastuty.umni@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the anatomy of structural exploitation under urban capitalism and to uncover how female workers negotiate their agency and professional rights outside the bounds of formal legal frameworks. This phenomenological qualitative study employs a critical political economy approach through in-depth interviews, participatory observation, and documentary analysis. The results show that neoliberalism normalizes exploitation through the absence of employment contracts, wages below a living wage, a lack of social protection, and the commodification of the body through demands for aesthetic labor without additional compensation. On a subjective level, female workers are shown not to be passive victims. As a survival strategy, they exercise agency to negotiate bodily autonomy regarding their appearance and build communal solidarity to cope with exploitative workloads. In conclusion, the illusion of labor flexibility in the informal sector exacerbates precariousness, thereby necessitating protective interventions by the state.

Keywords: Urban capitalism, Female workers, Aesthetic labor.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis anatomi eksploitasi struktural kapitalisme urban dan membongkar bagaimana pekerja perempuan (Mahasiswi) menegosiasikan agensi serta hak profesionalnya di luar ikatan hukum formal. Penelitian kualitatif berjenis fenomenologi ini menggunakan pendekatan ekonomi politik kritis melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa neoliberalisme menormalisasi eksploitasi melalui ketiadaan kontrak kerja, pengupahan di bawah standar kelayakan, nihilnya perlindungan sosial, serta komodifikasi tubuh lewat tuntutan *aesthetic labor* tanpa kompensasi tambahan. Pada dimensi subjektif, pekerja perempuan terbukti bukan korban pasif. Sebagai strategi bertahan hidup, mereka menggunakan agensi untuk menegosiasikan otonomi tubuh terkait penampilan, serta membangun solidaritas komunal guna menyiasati beban kerja eksploitatif. Kesimpulannya, ilusi fleksibilitas kerja di sektor informal memperparah prekaritas, sehingga mendesak hadirnya intervensi perlindungan dari negara.

Kata kunci: Kapitalisme urban, Pekerja perempuan, *Aesthetic labor*.

PENDAHULUAN

Fenomena menjamurnya kedai kopi modern di kawasan metropolitan seperti Kota Makassar bukan sekadar penanda pergeseran tren konsumsi masyarakat, melainkan manifestasi nyata dari penetrasi kapitalisme urban yang memproduksi gaya hidup *cosmopolitan* (Savitri et al., 2026). Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, jumlah kedai kopi di Makassar diperkirakan menembus angka 3.800 hingga 4.000 unit. Angka ini mencakup skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kedai kontainer, hingga waralaba berskala internasional. Hal ini menunjukkan bahwa menjamurnya kedai kopi menjadi mesin penghasilan baru bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor ini diproyeksikan menyumbang lebih dari 60 miliar ke kas daerah melalui pajak restoran dan hiburan (Siapbaca. 2026).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Perkembangan pesat ini diiringi oleh posisi strategis Kota Makassar sebagai pusat pendidikan tinggi di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dengan keberadaan puluhan perguruan tinggi, kota ini menampung ratusan ribu mahasiswa perantau. Melimpahnya populasi usia produktif ini menciptakan karakteristik suplai tenaga kerja yang sangat spesifik, yakni kelompok mahasiswi yang mencari pekerjaan sampingan (*part-time*). Bagi kelompok ini, bekerja di kedai kopi merupakan strategi bertahan hidup (*survival strategy*) yang rasional guna memenuhi kebutuhan domestik perkotaan, seperti biaya sewa indekos yang berkisar antara Rp500.000 hingga Rp1.500.000 per bulan, serta uang saku harian (Handoko & Maryatmo, 2022).

Riset ini menemukan adanya pola rekrutmen dan preferensi kerja yang paradoks dalam ekosistem kedai kopi lokal di Makassar. Data dari Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) oleh BPS secara konsisten menunjukkan bahwa sektor informal masih mendominasi serapan tenaga kerja muda usia 15-24 tahun, di mana fleksibilitas waktu sering kali menjadi alasan utama penyebab pengabaian terhadap hak pekerja seperti Jaminan keselamatan kerja. Demi menyelaraskan waktu kuliah dan menghindari rigiditas persyaratan administratif yang biasa diterapkan oleh korporasi atau *brand* kopi nasional seperti syarat SKCK, kontrak kerja penalti, dan komitmen jam kerja yang kaku, sehingga para pekerja perempuan ini cenderung memilih bekerja di kedai kopi lokal skala kecil-menengah. Akses pekerjaan ini umumnya diperoleh secara eksklusif melalui jaringan pertemanan informal (*informal networks*) (BPS Sulsel 2025).

Konsekuensi dari pilihan ini adalah lahirnya kondisi kerja yang rentan. Pemanfaatan jalur kenalan dan kedekatan personal secara tidak langsung mengaburkan relasi profesional antara pemberi kerja dan pekerja. Kontrak kerja tertulis sering kali ditiadakan dan diganti dengan kesepakatan lisan (*verbal agreement*). Akibatnya, terjadi pengabaian sistemik terhadap hak-hak normatif pekerja perempuan sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi ketenagakerjaan nasional (UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja). (Indonesia, 2023). Ketimpangan ini terlihat jelas ketika membandingkan standar normatif negara dengan realitas empiris di lapangan.

Ketimpangan antara regulasi yang berlaku dengan realitas yang dihadapi oleh para pekerja paruh waktu ini dapat dilihat secara pada Tabel 1.

Tabel 1: Standar Regulasi

Atribut Kerja	Standar Regulasi Negara	Realitas Kedai Kopi Lokal
Upah Minimum	UMK Kota Makassar (Berada di kisaran Rp3,5 - Rp3,6 Juta/bulan)	Upah paruh waktu berkisar Rp800.000 - Rp1.500.000/bulan (tanpa hitungan lembur)
Ikatan Hukum	Kontrak Kerja Tertulis (PKWT/PKWTT) yang berkekuatan hukum	Kesepakatan lisan berbasis pertemanan (<i>trust-based</i>)
Jaminan Sosial	Wajib BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan oleh pemberi kerja	Tidak ada jaminan kecelakaan kerja atau perlindungan Kesehatan
Beban Kerja	Fokus pada kompetensi teknis (pembuatan produk/pelayanan)	Dibebani <i>aesthetic labor</i> (tuntutan penampilan menarik & ramah) tanpa kompensasi

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 1, mempertegas kedalaman eksploitasi tersebut, terutama pada dimensi ekonomi dan beban performatif. Secara finansial, terjadi deprivasi hak yang sangat nyata di mana pekerja hanya diupah antara Rp800.000 hingga Rp1.500.000 per bulan. Angka ini sangat timpang jika disandingkan dengan UMK Makassar yang mencapai Rp3,5 Juta, membuktikan bahwa fleksibilitas waktu hanyalah ilusi untuk menekan ongkos variabel (upah) serendah mungkin. Lebih jauh, prekariat ini diperburuk oleh komodifikasi tubuh melalui *aesthetic labor*.

Alih-alih murni dinilai dari kompetensi teknis pelayanan, pekerja perempuan diwajibkan menyubsidi citra estetik kedai kopi melalui tuntutan penampilan menarik dan keramahan emosional, tanpa adanya kompensasi finansial tambahan atas beban kerja tak kasat mata tersebut. Lebih jauh, prekariat ini diperburuk oleh komodifikasi tubuh melalui *aesthetic labor* (Borah et al., 2024). Alih-alih murni dinilai dari kompetensi teknis pelayanan, pekerja perempuan diwajibkan menyubsidi citra estetik kedai kopi

Realitas empiris mengenai eksploitasi berlapis yang berakar dari kapitalisme urban ini seharusnya menjadi isu mendesak dalam diskursus ketenagakerjaan kontemporer. Namun, ironisnya, kerentanan (*precarity*) spesifik yang dialami pekerja perempuan di sektor informal modern—seperti industri kedai kopi—justru masih termarginalkan secara akademis. Kesenjangan literatur (*research gap*) ini terkonfirmasi dengan jelas ketika melihat tren publikasi global terkait kajian hak pekerja perempuan.

[illegible]

Berdasarkan pemetaan jaringan (*network visualization*) pada Gambar 1, terlihat bahwa kondisi kerja yang rentan pada sektor kedai kopi modern masih luput dari perhatian akademis. Hasil analisis bibliometrik pada database Scopus membuktikan bahwa kajian hak pekerja perempuan masih mengalami bias sektoral. Tren riset dunia cenderung memotret kerentanan perempuan secara terbatas, yakni hanya terpusat pada ranah informal tradisional-agraris (Klaster Merah) atau sektor informal ekstrem (Klaster Hijau). Alhasil, terjadi kekosongan studi dalam menepi prekaritas pekerja perempuan di industri jasa kreatif.

Citra modern dan estetika kedai kopi sering kali mengaburkan realitas praktik kerja eksploitatif, di mana tubuh dan emosi pekerja turut dikomodifikasi melalui tuntutan *aesthetic labor* (kerja estetik) yang tidak dikompensasi secara layak, karena pekerjaannya merupakan kelompok mahasiswi yang dianggap memiliki posisi tawar lebih baik (Scander & Jakobsson, 2022). Penelitian ini berupaya menjembatani celah tersebut dengan meneliti bagaimana interaksi antara jaringan informal dan pilihan rasional mahasiswi di Kota Makassar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, justru berujung pada pengabaian hak-hak ketenagakerjaan mereka secara normatif.

Berangkat dari celah penelitian (*research gap*) tersebut, penelitian ini hadir untuk menganalisis bagaimana interaksi antara jaringan informal perkotaan dan pilihan rasional mahasiswi di Kota Makassar justru berujung pada langgengnya pengabaian hak ketenagakerjaan mereka secara normatif. Secara lebih spesifik, studi ini bertujuan untuk membongkar bagaimana pekerja perempuan menegosiasikan identitas,

agensi, dan hak-hak profesional mereka di balik meja bar kedai kopi lokal yang bergerak tanpa ikatan hukum formal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi, yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan secara mendalam pengalaman hidup serta realitas keseharian para pekerja Perempuan di kedai kopi modern Kota Makassar. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkapkan makna subjektif di balik tindakan individu (Oluka, 2025). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci, yakni mahasiswi yang bekerja paruh waktu di kedai kopi lokal, pemilik usaha, serta pihak-pihak terkait yang memahami ekosistem tenaga kerja informal di Makassar (Hossain et al., 2024). Observasi partisipatif juga digunakan untuk memetakan interaksi sosial di kedai kopi, mengamati beban kerja tersembunyi seperti *aesthetic labor*, serta melihat langsung bagaimana kesepakatan lisan berbasis pertemanan dipraktikkan dalam lingkungan kerja. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelusuri data sekunder, laporan ketenagakerjaan, serta regulasi terkait hak-hak pekerja untuk menjadi komparator terhadap realitas empiris di lapangan.

Analisis data dilakukan dengan memadukan pendekatan ekonomi politik kritis untuk membedah anatomi eksploitasi dan komodifikasi kapitalisme urban. Data yang terkumpul diolah melalui proses reduksi data untuk memilah narasi informan yang relevan, penyajian data dalam bentuk deskriptif-analitis (Hastira et al., 2022). dan penarikan kesimpulan untuk menjawab penelitian mengenai pengabaian hak ketenagakerjaan di sektor informal modern (Mannan, 2024). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi secara komprehensif bagaimana para pekerja perempuan menavigasi struktur peluang yang terbatas serta mendefinisikan ulang agensi mereka di tengah kerentanan sistemik industri kopi modern.

PEMBAHASAN

Kedai kopi modern telah bertransformasi dari sekadar ruang konsumsi minuman menjadi arena kompleks di mana berbagai relasi kuasa beroperasi secara simultan. Konsep *third place* yang diperkenalkan oleh Ray Oldenburg mengidentifikasi kedai kopi sebagai ruang ketiga yang terpisah dari rumah dan tempat kerja, berfungsi sebagai tempat berkumpul, relaksasi, dan pengembangan koneksi sosial (Ferreira et al., 2021). Melalui lensa ekonomi politik kritis, ruang-ruang estetik yang menawarkan kenyamanan gaya hidup kosmopolitan ini harus dibaca sebagai situs bekerjanya kapitalisme urban yang secara subtil mengeksploitasi kerentanan kelas pekerja, khususnya Perempuan (Marlina, 2024) Alih-alih menghadirkan perlindungan dan kesejahteraan yang sejalan dengan masifnya perputaran modal, sektor informal modern ini justru memproduksi prekariat (kerentanan kerja) baru yang dinormalisasi atas nama fleksibilitas waktu. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan utama penelitian secara komprehensif, analisis empiris pada bagian ini akan dikonstruksikan ke dalam dua kerangka besar.

Pertama, membongkar anatomi eksploitasi struktural yakni bagaimana kapitalisme mengekstraksi nilai lebih (*surplus value*) dan mengomodifikasi estetika serta emosi pekerja di tengah absennya instrumen regulasi negara. Kedua, menelisik dimensi subjektif dan relasi kelas yakni bagaimana pekerja perempuan merespons, menavigasi, dan menegosiasikan identitas mereka saat terperangkap dalam paradoks antara kesadaran kelas yang kritis dan desakan struktural untuk bertahan hidup.

Praktik Neoliberalisme pada Ekosistem Kedai Kopi Modern.

Fenomena menjamurnya kedai kopi modern di kawasan metropolitan seperti Kota Makassar memperlihatkan anomali yang tajam dalam struktur ketenagakerjaan urban. Dengan estimasi 3.800 hingga 4.000 unit kedai kopi yang beroperasi, sektor ini diproyeksikan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga lebih dari Rp60 Miliar. Namun, perputaran modal yang masif ini sangat berbenturan dengan realitas keseharian yang dialami oleh para pekerja perempuannya, terutama terkait bagaimana mereka

direkrut dan diupah. Hal ini terungkap dari penuturan informan:

"Kalau yang kemarin dari teman ke teman ji kak. Kebetulan nongkrong ka di situ dan kutanya temanku lagi cari kerja ka dan dia kerja di situ juga jadi na rekomendasikan ka"

Kutipan wawancara di atas mengonfirmasi fenomena empiris bahwa mekanisme rekrutmen di sektor kedai kopi berskala mikro dan menengah sangat bergantung pada jaringan pertemanan informal (*informal networks*). Bagi kelompok mahasiswa perantau, jalur eksklusif berbasis kedekatan personal ini dipandang sebagai pilihan yang efisien dan taktis, mengingat prosesnya yang instan tanpa birokrasi yang rumit. Terdapat kecenderungan bahwa para pekerja muda ini sengaja menghindari rigiditas persyaratan administratif seperti kewajiban menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), ancaman penalti dalam kontrak, maupun komitmen jam kerja yang kaku yang lazim diterapkan oleh jenama kopi nasional atau korporasi besar.

Kendati menawarkan kemudahan akses, pola rekrutmen melalui rekomendasi teman ini membawa implikasi langsung terhadap karakter hubungan kerja yang terbentuk. Pemanfaatan jalur informal secara tidak langsung mereduksi batas-batas profesionalisme antara pemilik usaha (pemberi kerja) dan mahasiswa (pekerja). Dalam realitas praktisnya, ikatan hukum formal yang mengikat, seperti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sering kali ditiadakan. Hubungan kerja pada akhirnya hanya ditopang oleh kesepakatan lisan (*verbal agreement*) yang bertumpu semata-mata pada asas kepercayaan (*trust-based*) dan relasi pertemanan.

Kapitalisme neoliberal telah melahirkan bentuk-bentuk eksploitasi baru yang melampaui konsepsi tradisional tentang kerja upahan. Studi Marxis kontemporer menunjukkan bahwa eksploitasi tidak lagi terbatas pada hubungan kerja konvensional tetapi semakin beroperasi melalui pengaturan kerja prekariat, utang finansial, kerja yang dimediasi platform, dan aktivitas reproduktif yang tidak dibayar. Aspek-aspek neoliberalisme mengaburkan struktur eksploitatif dengan menggambarkan ketidaksetaraan sistemik sebagai hasil dari pilihan dan tanggung jawab individual. Konsep *reserve army of labor* Marx mempertahankan relevansinya sebagai relasi sosial yang konstitutif dalam kapitalisme, bukan sekadar efek dari akumulasi modal tetapi hubungan dinamis yang mengabadikan prekaritas pekerja dan perjuangan kelas (Colombini, 2025).

Absennya instrumen legal tertulis tersebut menempatkan pekerja perempuan dalam posisi tawar yang lemah, yang secara sistematis bermuara pada pengabaian hak-hak normatif ketenagakerjaan mereka. Praktik pengabaian ini terekam jelas dari pengalaman informan lain yang memaparkan bagaimana ilusi "fleksibilitas" justru menjadi pintu masuk bagi ketidakpastian kerja. Regulasi ketenagakerjaan yang ada tidak memadai untuk mengatasi hubungan kerja yang dimediasi platform yang ditandai oleh manajemen algoritmik dan ketergantungan ekonomi (Wijaya, 2026).

"Beda-beda tergantung cafe kak, kalo saya kemarin nda terlalu strict ji. Ndd ji kontrak dll, biasanya sih training dulu sebulan kalo cocok diperpanjang... Gaji saja nda UMR."

Pernyataan tersebut memvalidasi sekaligus mengartikulasikan tiga aspek kerentanan struktural yang dialami pekerja. Pertama, ketiadaan kontrak kerja secara definitif melegitimasi posisi pekerja yang beroperasi tanpa payung kepastian hukum. Kedua, pemberlakuan masa percobaan (*training*) yang didasarkan pada kecocokan subjektif ("*kalo cocok diperpanjang*") menunjukkan tingginya diskresi sepihak pemberi kerja dalam menentukan keberlanjutan nasib pekerja. Ketiga, pengakuan eksplisit mengenai upah yang tidak memenuhi standar kelayakan secara tegas memperlihatkan terjadinya eksploitasi ekonomi. Merujuk pada data lapangan, pekerja paruh waktu di sektor ini umumnya hanya menerima kompensasi finansial antara Rp800.000 hingga Rp1.500.000 per bulan, tanpa kejelasan perhitungan lembur. Nominal tersebut mengonfirmasi disparitas yang drastis jika dikomparasikan dengan standar Upah Minimum Kota (UMK) Makassar yang menyentuh angka Rp3,5 hingga Rp3,6 juta per bulan.

Depresiasi terhadap nilai kerja ini semakin dipertegas oleh temuan empiris lainnya yang menunjukkan absennya penghargaan terhadap kompetensi dan profesionalisme teknis.

Berdasarkan hasil wawancara, terungkap fakta bahwa nyaris tidak terdapat kesenjangan pendapatan

(*income gap*) yang signifikan antara pekerja (barista) yang belum memiliki sertifikat pelatihan dengan mereka yang telah mengantongi sertifikasi kompetensi formal sebagai pembuat kopi. Realitas ini mengindikasikan bahwa ekosistem kedai kopi berskala mikro dan menengah cenderung tidak memposisikan *human capital* atau keahlian teknis sebagai variabel yang mampu meningkatkan daya tawar (*bargaining power*) pekerja secara finansial. Alih-alih memberikan insentif atas profesionalisme, industri ini terbukti lebih berorientasi pada maksimalisasi efisiensi dengan cara mematok struktur upah yang stagnan dan menyerap tenaga kerja semurah mungkin.

Realitas empiris mengenai pilihan rasional mahasiswa yang terperangkap dalam kerentanan kerja ini memerlukan pembacaan yang lebih komprehensif melalui kacamata ekonomi politik. Secara konseptual, kajian ekonomi politik mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek, proses, maupun kelembagaan, dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam konteks ketenagakerjaan di kedai kopi lokal, sistem kekuasaan dan tata kelola pemerintah sejatinya berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengatur kehidupan sosial pekerja sekaligus sistem ekonomi di sektor tersebut.

Merujuk pada pandangan Caporasi, ketika ilmu politik dan ilmu ekonomi disatukan, instrumen-instrumen ekonomi seperti mekanisme pasar, penentuan harga (upah), dan investasi harus dianalisis dengan mempergunakan latar (*setting*) politik tempat peristiwa ekonomi tersebut beroperasi. Praktik kerja tanpa kontrak tertulis dan stagnasi upah yang mengabaikan standar kelayakan di kedai kopi Makassar mencerminkan sebuah lanskap ekonomi politik di mana instrumen perlindungan negara gagal menjangkau sektor informal. Pendekatan ini meletakkan bidang politik, dalam hal ini regulasi dan pengawasan negara, tersubordinasi oleh kepentingan ekonomi pasar (Freeman, n.d.).

Fokus paling utama dalam anatomi ilmu ekonomi politik konvensional adalah melihat seberapa besar porsi dan peran negara atau pemerintah di dalam sistem ekonomi. Ketiadaan intervensi struktural yang membiarkan pekerja perempuan dibayar murah dan turut dieksploitasi melalui tuntutan *aesthetic labor* menunjukkan minimnya perlindungan institusional. Secara faktual, jika peran negara terbukti kecil atau tidak dominan dalam memitigasi ketimpangan relasi kerja ini, maka sistem ekonomi politik yang terbentuk di lapangan lebih digolongkan pada anatomi sistem kapitalis-liberal. Dalam tatanan inilah, rasionalitas pekerja perempuan untuk sekadar bertahan hidup di perkotaan diserap oleh pemilik modal untuk menekan biaya produksi serendah mungkin. Hal ini menegaskan bahwa eksploitasi dan deprivasi hak pekerja bukanlah sekadar kelemahan relasi perdata antar individu, melainkan konsekuensi logis dari struktur ekonomi politik yang menempatkan mekanisme pasar di atas jaminan hak-hak warga negara.

Kondisi minimnya peran negara dan dominasi kapital swasta tersebut pada dasarnya merupakan karakteristik utama dari menguatnya paradigma neoliberalisme dalam lanskap ketenagakerjaan di sektor informal modern. Secara konseptual, neoliberalisme adalah sebuah versi terbaru dari liberalisme klasik yang bertumpu pada ide pokok bahwa ekonomi akan berjalan paling baik ketika dilepaskan dari campur tangan pemerintah. Gagasan ini merefleksikan sebuah keyakinan absolut pada mekanisme ekonomi pasar bebas serta individualisme atomistik.

Praktik kesepakatan kerja lisan yang meniadakan kekuatan hukum, pengabaian standar Upah Minimum Kota (UMK), dan ketiadaan perlindungan sosial di kedai kopi lokal merupakan manifestasi empiris dari asumsi dasar neoliberalisme yang pertama, yakni berlakunya hukum pasar yang menuntut kebebasan penuh bagi pergerakan modal dan jasa. Dalam kerangka ini, segala bentuk regulasi ketenagakerjaan dari negara yang dianggap dapat menghalangi mobilitas modal cenderung dipinggirkan, sehingga kekuatan pasar dibiarkan berkuasa dan bekerja mengatur dirinya sendiri menurut mekanisme aturannya. Konsekuensinya, eksploitasi tenaga kerja murah dan ketiadaan kompensasi atas kerja estetis (*aesthetic labor*) dinormalisasi sebagai upaya efisiensi yang sejalan dengan kebijakan pokok neoliberal, di mana inisiatif usaha tidak boleh dihambat oleh regulasi negara.

Neoliberalisme tidak hanya beroperasi pada struktur ekonomi material, tetapi juga meresap secara ideologis dengan berupaya mengubah persepsi tentang publik dan komunitas menjadi bentuk

individualisme serta tanggung jawab individual. Dalam tatanan ekosistem kedai kopi ini, pilihan rasional para mahasiswi untuk bertahan di tengah kondisi kerja yang rentan dikonstruksikan murni sebagai tanggung jawab individual (*individual responsibility*) mereka dalam merespons kerasnya tuntutan ekonomi perkotaan, bukan sebagai akibat dari absennya perlindungan sistemik.

Realitas eksploitatif ini menegaskan watak dasar neoliberalisme sebagai sebuah reaksi yang secara perlahan melucuti peran negara dalam melindungi warga negaranya. Para pekerja perempuan di industri jasa gaya hidup ini pada akhirnya ditinggalkan berjuang sendirian, karena tatanan neoliberalisme telah mengembalikan esensi hubungan kerja yang seharusnya memuat hak-hak asasi dan perlindungan normatif menjadi sekadar transaksi ekonomi yang sepenuhnya tunduk pada rezim hukum pasar.

Dimensi Subjektif dan Negosiasi Agensi Pekerja Perempuan di Tengah Kerentanan.

Pembacaan terhadap ekosistem kerja di kedai kopi modern harus ditelisik secara lebih mendalam melalui dimensi subjektif. Realitas pekerja perempuan ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai kepasrahan yang pasif. Dengan menggunakan kerangka teori pilihan rasional, keputusan untuk tetap bertahan di ekosistem yang minim regulasi tersebut pada dasarnya merupakan strategi bertahan hidup guna merespons struktur peluang yang terbatas di perkotaan. Hal ini melahirkan sebuah paradoks antara kesadaran kelas yang kritis dan desakan struktural ekonomi. Kesadaran kritis ini terungkap secara lugas dari penuturan informan mengenai motif ekonomi dan realitas pekerjaannya:

“Kerja barista itu membuat uang tambahan ji kak. Gaji barista nda cukup bahkan biayai diri sendiri. Dan kita tidak bisa nolak karena pekerja barista umumnya dari kalangan pelajar yang memang cari-cari uang sampingan.”

Kutipan wawancara tersebut secara spesifik membongkar bagaimana status sosial pekerja yakni sebagai pelajar atau mahasiswa menjadi faktor utama yang melemahkan daya tawar mereka di hadapan pemberi kerja. Pernyataan bahwa mereka tidak bisa menolak mengindikasikan adanya jebakan struktural, di mana para mahasiswi ini terpaksa menerima kompensasi finansial yang tidak layak karena industri telah mbingkai pekerjaan tersebut sekadar sebagai tempat mencari uang sampingan. Ungkapan bahwa gaji tersebut tidak cukup untuk membiayai diri sendiri mempertegas terjadinya normalisasi atas praktik upah murah.

Pemilik modal secara jeli memanfaatkan identitas demografis pekerja untuk merasionalisasi pemberian upah di bawah standar kelayakan. Karena orientasi pekerja sejak awal diasumsikan hanya untuk menambah uang saku, kerentanan kolektif ini justru dieksploitasi untuk melanggengkan sistem pengupahan yang tidak adil tanpa harus memicu perlawanan atau tuntutan hukum dari para pekerja itu sendiri. Melalui kacamata neoliberalisme pada tataran subjektif, pernyataan informan tersebut memperlihatkan keberhasilan sistem kapitalisme urban dalam menciptakan subjek pekerja yang ideal. Jika pada tataran makro neoliberalisme beroperasi dengan cara mencabut regulasi negara, pada tataran mikro ideologi ini bekerja dengan cara merasuk ke dalam alam pikir pekerja agar mereka merasionalisasi kerentanannya sendiri.

Pernyataan informan yang mendefinisikan keberadaan mereka sekadar untuk mencari uang tambahan dan merasa tidak bisa menolak kondisi tersebut, menunjukkan terjadinya internalisasi logika pasar secara mendalam. Dalam tatanan neoliberal, pekerja dibentuk menjadi entitas kalkulatif yang secara otomatis menanggung seluruh risiko ekonomi secara individual. Alih-alih melihat upah di bawah standar kelayakan sebagai sebuah kejahatan struktural yang harus digugat, para mahasiswi ini justru mewajarkannya sebagai konsekuensi logis dari status mereka sebagai pelajar.

Ketidakberdayaan pekerja untuk menolak gaji yang minim tersebut membuktikan bahwa penerimaan mereka bukanlah bentuk kesepakatan profesional yang setara, melainkan bentuk internalisasi identitas yang melemahkan diri mereka sendiri. Para pekerja secara tidak sadar telah menerima konstruksi sosial bahwa nilai tenaga mereka memang pantas dihargai rendah, semata-mata karena label 'pelajar' yang melekat pada diri mereka.

Selain internalisasi identitas yang mewajarkan pengupahan di bawah standar, bekerjanya ideologi pasar di tingkat mikro juga termanifestasi pada bagaimana pekerja memaklumi penundukan fisik dan perampasan waktu mereka. Hal ini terekam jelas dari penuturan informan mengenai beban kerja ganda dan sistem waktu kerja yang sangat tidak menentu:

"Kerja barista nda santai apalagi double atau triple job, barista tommy pramusaji tommy. Pokoknya cocok ji karena alasan itu kita tidak menerima jaminan perlindungan kerja... Kafeku 18 jam kak. Tiga shift, pagi, tengah, malam. Membayangkan mki kalo lompat shift org tutup jam 2 malam buka jam 7, ya ini berat krn jadwal berubah setiap minggu nda pasti tergantung manajemen."

Kutipan tersebut menyingkap wajah asli dari jargon pekerjaan paruh waktu yang fleksibel di sektor informal. Melalui kacamata agensi dan pilihan rasional, fleksibilitas faktanya berjalan asimetris dan menjadi hak istimewa yang hanya dimiliki oleh pemberi kerja. Manajemen memiliki kuasa absolut untuk mendikte jadwal dan membebankan tugas ganda sebagai peracik kopi sekaligus pramusaji demi menekan ongkos operasional serendah mungkin. Fleksibilitas tenaga kerja dalam praktiknya membebankan seluruh ketidakpastian dan risiko kesehatan sepenuhnya ke pundak individu pekerja perempuan. Tuntutan ketersediaan fisik yang ekstrem melalui pergantian jadwal kerja secara mendadak secara nyata merusak ritme biologis mereka di tengah tuntutan untuk tetap menyelesaikan pendidikan.

Namun, temuan yang paling krusial dari penuturan tersebut adalah bagaimana pekerja kembali melakukan rasionalisasi terhadap ketiadaan jaminan perlindungan sosial dan buruknya sistem jam kerja. Pekerja menganggap kondisi kerja yang serabutan tersebut sebagai suatu kewajiban. Penormalan atas eksploitasi ini semakin memperkuat argumen bahwa subjek pekerja telah sepenuhnya dikondisikan untuk menerima kerentanan struktural murni sebagai risiko personal. Ketidadaan instrumen keselamatan dan kesehatan kerja tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran hak normatif dari pihak manajemen, melainkan diterima begitu saja sebagai bagian dari konsekuensi logis bekerja di sektor informal yang fleksibel.

Dalam tatanan neoliberalisme, kesejahteraan ekonomi dan keamanan fisik manusia secara perlahan dilepaskan dari tanggung jawab pemberi kerja maupun negara, untuk kemudian diserahkan sepenuhnya pada ketidakpastian mekanisme pasar. Penormalan eksploitasi fisik oleh pekerja itu sendiri mengonfirmasi bahwa mereka telah dikondisikan untuk menerima kerentanan struktural murni sebagai tanggung jawab dan risiko personal. Ketidadaan instrumen keselamatan kerja tidak lagi dipandang sebagai kejahatan struktural atau pelanggaran hak normatif, melainkan diterima sebagai resiko individual yang logis dari status mereka sebagai pekerja paruh waktu. Sistem kapitalisme pasar bebas ini secara subtil telah melucuti harapan pekerja terhadap hak perlindungan komunal, meninggalkan mereka berjuang sendirian menanggung beban fisik yang ekstrem demi bertahan hidup di kerasnya ruang urban.

Meskipun terperangkap dalam kondisi kerja yang rentan dan penundukan fisik yang masif, para pekerja perempuan ini sesungguhnya tidak sepenuhnya kehilangan daya tawar. Di tengah keputungan rasionalitas pasar, mereka masih berupaya merebut kembali ruang agensinya, terutama ketika berhadapan dengan tuntutan performatif di industri pelayanan. Negosiasi identitas ini terlihat jelas dari cara informan menyikapi regulasi penampilan tubuh dan pakaian di ekosistem kedai kopi:

"Menurutku netral ji kak. Karena tuntutananya tidak terlalu memberatkan. Biasanya Cuma mewajibkan berpenampilan rapih... tapi ada sebagian cafe yang diperbolehkan asal berpenampilan menarik, ada juga cafe yg melarang pake hijab. Kalau saya sendiri sebagai organisasi yg aktif mengkaji perempuan, aliansi lama bekerja di kafe ku sebagai full time kemarin karena dia bukan salah satu kafe dengan aturan penampilan yg ketat... paling berpenampilan menarik dan menurutku syarat itu masih oke ji karena kita kerja dibidang pelayanan."

Melalui kacamata analisis agensi, narasi ini menyoroti bentuk perlawanan diam-diam dan negosiasi yang sangat taktis. Dengan berbekal kesadaran kritis mengenai relasi gender, pekerja menggunakan kapasitas intelektualnya untuk memilah dan menolak ruang kerja yang menerapkan regulasi diskriminatif terhadap tubuhnya, seperti fenomena larangan berhijab di beberapa kedai kopi. Pekerja mendefinisikan

ulang posisi tawarnya dengan memilih bertahan di kedai yang batas tuntutan penampilannya masih dapat dikompromikan dengan prinsip personalnya. Hal ini membuktikan bahwa subjek pekerja masih berupaya mempertahankan otonomi atas tubuh mereka.

Akan tetapi, kompromi pekerja yang pada akhirnya mewajarkan tuntutan penampilan menarik tersebut harus dibedah lebih tajam menggunakan kacamata teori ekonomi politik. Merujuk pada pandangan dalam buku *Neoliberalisme*. (Wibowo, n.d.). fenomena kerja estetis ini merupakan bentuk nyata dari bekerjanya "peradaban pasar" yang telah merembes hingga ke aspek paling privat dari kehidupan manusia. Dalam tatanan neoliberalisme, mekanisme pasar tidak hanya mengeksploitasi tenaga fisik pekerja, tetapi juga secara agresif mengomodifikasi tubuh, estetika, dan emosi perempuan sebagai bagian dari nilai jual kapitalisme gaya hidup, Proses komodifikasi tenaga kerja kreatif menjadi objek dalam sistem kapitalis menghasilkan alienasi.

Pernyataan informan yang pada akhirnya memaklumi syarat berpenampilan menarik karena merasa bekerja di bidang pelayanan menunjukkan keberhasilan ideologi neoliberal dalam membentuk pekerja sebagai *homo economicus* atau manusia ekonomi selain itu, dalam analisis Feminisme liberal menekankan bahwa diperlukan sebuah gerakan besar-besarnya yang tidak hanya berasal dari para perempuan dan pejuang kesetaraan itu sendiri, tetapi juga dukungan dari pemerintah sebagai pemegang kekuasaan di suatu wilayah (Hastira et al., 2024).

Segala bentuk tindakan dan kompromi sosial kini didasarkan pada kalkulasi untung-rugi individual. Pekerja melakukan kalkulasi rasional (Bianchino, 2019). Fenomena ini terutama terlihat jelas di kalangan pekerja perempuan yang beroperasi dalam sektor-sektor yang mengalami feminisasi kerja intensif (Malagi & Chachadi, 2013). mereka terpaksa menoleransi tingkat komodifikasi tubuh pada batas tertentu demi memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja yang bebas, sekaligus sebagai siasat agar akses ekonomi mereka di ruang perkotaan tidak terputus. Di samping kompromi identitas yang bersifat individual, negosiasi agensi pekerja perempuan juga bermanifestasi dalam bentuk siasat keseharian yang sangat pragmatis. Menghadapi kerasnya tuntutan manajemen dan ketiadaan instrumen keselamatan kerja, para mahasiswi ini mengambil inisiatif untuk menciptakan mekanisme pertahanan diri mereka sendiri melalui pendayagunaan relasi informal. Praktik memanipulasi ruang kerja ini terekam jelas dari strategi informan berikut:

"Paling antar sesama ji minta baku tukar shift atau baku backup... Baru selamat menikmati ja kemarin kerja mungkin karena tongkronganku juga di sana. Jadi kerja skalian nongkrong... Setelah jadi barista di tempat lama, mudah ma cari-cari kerja barista di tempat lain krn banyakmi kukenal rekan barista juga makanya bisaka part time di beberapa cafe lain di makassar."

Kutipan di atas membuktikan bahwa pekerja secara aktif merekayasa ruang kerja yang pada dasarnya eksploitatif menjadi ruang sosial komunal untuk menetralisasi kelelahan fisik dan mental melalui konsep kerja sekalian nongkrong. Kesepakatan lisan didayagunakan secara maksimal untuk saling bertukar jadwal dan menutupi jam kerja sesama rekan sejawat, sehingga kepentingan akademis mereka di kampus tetap terselamatkan. Lebih jauh lagi, relasi pertemanan ini dikonversi secara taktis menjadi modal sosial guna memastikan kemudahan mobilitas pekerjaan di kedai lain pada masa depan. Apabila dibedah menggunakan analisis neoliberalisme sebagaimana diuraikan oleh Wibowo dan Wahono, taktik pertemanan ini sesungguhnya memperlihatkan sebuah anomali agensi yang sangat menarik. Ideologi pasar pada dasarnya berupaya mengonstruksi pekerja semata-mata sebagai manusia ekonomi yang individualistis, di mana setiap orang saling bersaing dan memikirkan keuntungan pribadinya sendiri, sehingga menyingkirkan semangat solidaritas komunal.

Tidak hanya itu Rasa hormat dan perlindungan juga harus diwujudkan dengan memperhatikan kondisi kelompok minoritas yang rentan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. (Zuhud, et. al, 2025) Kelompok minoritas tersebut seharusnya memiliki kesadaran terhadap eksploitasi yang dilakukan dalam dunia kerja yang berbasis kepada penggunaan jasa. Akan tetapi, para mahasiswi ini justru menavigasi jebakan individualisme tersebut dengan merawat modal sosial mereka. Alih-alih saling menjatuhkan dalam

kompetisi pasar tenaga kerja yang rentan, mereka menegosiasikan agensinya dengan membangun jaringan pengamanan alternatif berbasis solidaritas horizontal. Pertemanan dan rasa saling percaya digunakan sebagai perisai untuk meredam kerasnya eksploitasi jadwal kerja. Pembedahan terhadap setiap dimensi subjektif ini menegaskan sebuah konklusi penting para mahasiswi pekerja paruh waktu di kedai kopi modern bukanlah korban pasif yang tidak berdaya, melainkan aktor rasional yang terus bernegosiasi. Mereka secara sadar membarter hak-hak normatif ketenagakerjaan dengan kelonggaran informalitas, serta mendayagunakan modal sosial dan kompromi identitas demi mengamankan keberlanjutan hidup dan pendidikan di tengah kerasnya desakan ekosistem perkotaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa menjamurnya kedai kopi modern di Kota Makassar bukan sekadar fenomena pergeseran gaya hidup perkotaan, melainkan wujud nyata dari penetrasi kapitalisme urban yang memproduksi kerentanan kerja (prekaritas) baru, khususnya bagi pekerja perempuan paruh waktu. Absennya instrumen regulasi negara yang menjangkau sektor informal modern dan dominasi logika pasar neoliberal telah menormalisasi praktik-praktik eksploitatif. Kondisi ini dibuktikan dengan ketiadaan kontrak kerja tertulis yang berkekuatan hukum, pengupahan yang stagnan dan jauh di bawah standar Upah Minimum Kota (UMK) Makassar, serta tidak adanya jaminan sosial ketenagakerjaan. Lebih jauh, kapitalisme urban ini mengeksploitasi pekerja melalui komodifikasi tubuh dan emosi berupa tuntutan *aesthetic labor* yang membebani tanpa adanya kompensasi finansial tambahan. Meskipun terperangkap dalam sistem ekonomi politik yang eksploitatif, penelitian ini menemukan bahwa para pekerja perempuan (mahasiswi) bukanlah korban yang sepenuhnya pasif. Keputusan mereka untuk bertahan dalam ekosistem kerja tanpa payung hukum ini merupakan strategi bertahan hidup (*survival strategy*) yang rasional dalam merespons terbatasnya struktur peluang ekonomi perkotaan demi memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan. Di tengah jebakan individualisme neoliberal yang berupaya merasionalisasi kerentanan mereka, pekerja perempuan terus menegosiasikan otonomi tubuh dan agensi mereka dengan memilih lingkungan kerja yang batasan tuntutan penampilannya masih dapat dikompromikan. Selain itu, mereka secara taktis menavigasi beban kerja yang berat dengan merawat modal sosial, mendayagunakan jaringan pertemanan, dan membangun solidaritas horizontal sesama rekan pekerja untuk menetralisasi kepenatan fisik akibat sistem jam kerja yang asimetris.

Realitas yang di hadapi oleh pekerja perempuan (Mahasiswi) di sektor kedai kopi modern mengonfirmasi bahwa jargon fleksibilitas di sektor informal pada praktiknya merupakan ilusi yang hanya menguntungkan pemilik modal untuk menekan ongkos produksi. Oleh karena itu, realitas empiris ini harus menjadi otokritik bagi diskursus ketenagakerjaan kontemporer, di mana negara dituntut untuk hadir. Negara tidak boleh hanya memosisikan sektor industri jasa gaya hidup ini sebagai mesin penambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan harus segera merumuskan regulasi ketenagakerjaan yang lebih adaptif untuk melindungi hak-hak normatif pekerja dari eksploitasi pasar bebas.

REFERENSI

- Bianchino, G. (2019). Setelah Jam Kerja Dan Lembur: Reproduksi Sosial Modal Manusia. *Journal Media/Culture*, 22(6). <https://doi.org/10.5204/Mcj.1611>
- Borah, T., Saikia, J., & Begum, A. M. (2024). Emotional Labour: Its Effect On Work Performance. *Asian Journal Of Agricultural Extension, Economics & Sociology*, 42(6), 284–292. <https://doi.org/10.9734/Ajaees/2024/V42i62491>
- Bps Sulsel. (2025). *Pekerja Setengah Waktu Sulsel: Antara Fleksibilitas Dan Kerentanan*. <https://www.instagram.com/p/Dqsnn7nk-9h/>
- Colombini, I. (2025). Technological Developments And Capitalist Subsumption: New Information Technologies In The Construction Of The Capitalist Individual. *Carlos Chagas Filho Foundation For Research Support Of The State Of Rio De Janeiro*. <https://triple->

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

C.At/Index.Php/Triplec/Article/View/1552/1669

- Ferreira, J., Ferreira, C., & Bos, E. (2021). Spaces Of Consumption, Connection, And Community: Exploring The Role Of The Coffee Shop In Urban Lives. *Geoforum*, 119, 21–29. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.12.024>
- Freeman, R. B. (N.D.). Regulasi Ketenagakerjaan, Serikat Pekerja, Dan Perlindungan Sosial Di Negara Berkembang: Distorsi Pasar Atau Institusi Yang Efisien? *Nber : National Bureau Of Economic Research*, 2009. <https://doi.org/10.3386/W14789>
- Handoko, G. F., & Maryatmo, R. (2022). Strategi Bertahan Dan Bersaing Pada Usaha Mikro Dan Kecil Kedai Kopi Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Semarang Tahun 2020. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi Dan Perpajakan (Jemap)*, 5(1), 26–44. <https://doi.org/10.24167/Jemap.V5i1.4163>
- Hastira, M. F., Muhammad Alhamin, & Ariana Yunus. (2022). Pendekatan Sosio-Spasial Lefebvre Dalam Kebijakan Pemanfaatan Ruang (Perda Rtrw Kota Parepare). *Neorespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 45–57. <https://doi.org/10.52423/Neores.V4i1.18>
- Hastira, M. F., Patty, A. N., Jefri, J., Burhan, R., & Pratama, G. (2024). The Dominance Of Women In Structural Positions: A Gender Analysis Of The Gowa Regency Education Office. *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 8(2), 139–156. <https://doi.org/10.21274/Martabat.2024.8.2.139-156>
- Hossain, M. S., Alam, M. K., & Ali, M. S. (2024). Phenomenological Approach In The Qualitative Study: Data Collection And Saturation. *Icrrd Quality Index Research Journal*, 5(2), 148–172. <https://doi.org/10.53272/Icrrd.V5i2.4>
- Indonesia, P. R. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, (176733), 1–1127.
- Malagi, M. A. K., & Chachadi, D. A. H. (2013). *Innovative Hr Practices To Improve Socio-Economic Conditions Of Women Workers In Garment Industry-An Empirical Study*. <https://api.semanticscholar.org/Corpusid:31329797>
- Mannan, M. A. (2024). Data Collection And Saturation In Exploring The Public Sector Accounting In Bangladesh. *Icrrd Quality Index Research Journal*, 5(1), 179–197. <https://doi.org/10.53272/Icrrd.V5i1.8>
- Marlina, B. N. (2024). Konstruksi Gaya Hidup Di Kedai Kopi Di Kota Malang Dari Perspektif Kekerasan Simbolis. *Kanal Journal Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 12(2). <https://doi.org/10.21070/Kanal.V12i2.1769>
- Oluka, A. (2025). Phenomenological Research Strategy: Descriptive And Interpretive Approaches. *F1000research*, 14, 725. <https://doi.org/10.12688/F1000research.166273.1>
- Savitri, M. A., Santosa, I., Junaidy, D. W., & Maharani, Y. (2026). Reminiscing Coffee Culture In Adaptive Reuse Coffeeshop In Heritage Building, Euphoria Or Sustainable? *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 11(1), 742–750. <https://doi.org/10.36418/Syntax-Literate.V11i1.63595>
- Scander, H., & Jakobsson, B. M. (2022). Gastronomy Competition And Restaurant Practice: Sommeliers' Understanding Of The Game Of Social Craft. *International Journal Of Gastronomy And Food Science*, 29(March), 100567. <https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2022.100567>
- Siapbaca. (2026). *Tembus 4.000 Unit! Coffee Shop Di Makassar Jadi Penggerak Ekonomi Kota*. <https://siapbaca.com/tembus-4-000-unit-coffee-shop-di-makassar-jadi-penggerak-ekonomi-kota/>
- Wibowo, I. (N.D.). *Neoliberalisme -- I. Wibowo & Francis Wahono (Editor) -- (Welib.Org).Pdf*.
- Wijaya, I. (2026). *Legal Protection In Indonesia Of Online Ride-Hailing Drivers And Digital Freelancers In The Gig Economy Era*. 4(1), 30–37. File:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Legal_Protection_In_Indonesia_Of_Online_Ride-Haili.Pdf.